

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
PEDOMAN LITERASI.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	16
D. Penelitian Terdahulu	19
E. Metode Penelitian	39
F. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB II : KAJIAN TEORI.....	48
A. Meaningful Participation	48
1. Pengertian Meaningful Participation	48
2. Elemen-Elemen Meaningful Participation	49
a. Inklusivitas.....	49
b. Transparansi.....	50
c. Akuntabilitas.....	50
d. Demokrasi Partisipatif.....	51

3. Konsep Ideal Meaningful Participation	51
B. Partisipasi Publik	53
1. Definisi dan Arti Penting Partisipasi Publik	53
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Publik	55
3. Tahapan Partisipasi	57
4. Hambatan-Hambatan Partisipasi	60
5. Tema Kunci Dalam Partisipasi	61
6. Metode Partisipasi	64
7. Prinsip Norma dan Tolak Ukur dalam Menilai Kualitas Inovasi Demokratis dan Prosedur Partisipasi	66
C. Open Governance	72
1. Pengertian Open Governance	72
2. Indikator Open Governance.....	80
a. Transparansi.....	91
b. Partisipasi Publik	92
c. Akuntabilitas.....	93
d. Penggunaan Teknologi.....	94
3. Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Implementasi Open Governance	94
D. Siyāsah Dustūriyyah	97
1. Pengertian Siyāsah Dustūriyyah	97
2. Objek Kajian Fiqih Siyāsah Dustūriyyah	102
3. Rakyat, Kedudukan, Hak dan Kewajibannya	111
4. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyāsah Dustūriyyah.....	118
5. Partisipasi Masyarakat dalam Siyāsah Dustūriyyah	136
6. Konsep Syūrā.....	141
7. Praktik Keterlibatan Masyarakat	143

BAB III : MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO	145
--	------------

A.	Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo	146
1.	Latar Belakang Lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2009.	146
2.	Dampak Perda No. 4 Tahun 2009	149
3.	Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Kabupaten Ponorogo	153
B.	Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo	180
1.	Latar Belakang Lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2010.	180
2.	Dampak Perda Perda Nomor 3 Tahun 2010	183
3.	Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo	184
C.	Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo	186
1.	Latar Belakang Lahirnya Perda Nomor 2 Tahun 2020.	186
2.	Dampak Perda Nomor 2 Tahun 2020	190
3.	Pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo	192
D.	Raperda tentang Fasilitas Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren di Kabupaten Ponorogo	193
1.	Latar Belakang Lahirnya Raperda tentang Fasilitas Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren	193

2. Pembentukan Raperda tentang Fasilitas Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren	198
E. Pembahasan dan Analisis Terhadap Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ponorogo	200
BAB IV : TELAAH EPISTEMOLOGIS TERHADAP BELUM IDEALNYA MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO	213
A. Kondisi Geografis dan Keadaan Penduduk di Kabupaten Ponorogo.....	213
1. Kondisi Geografis.....	213
2. Keadaan Penduduk	214
B. Karakter Masyarakat Ponorogo	215
C. Hambatan-Hambatan Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ponorogo....	220
D. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah	241
E. Pembahasan dan Analisis Terhadap Belum Idealnya Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ponorogo.....	245
BAB V : KONSEKUENSI BELUM IDEALNYA <i>MEANINGFUL PARTICIPATION</i> DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP OPEN GOVERNANCE DI KABUPATEN PONOROGO	270
A. Konsekuensi Terhadap Legitimasi Kebijakan Pemerintah Daerah.....	271
B. Konsekuensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah...	273
C. Konsekuensi Terhadap Responsifitas Kebutuhan Masyarakat.....	274

D. Konsekuensi Terhadap Keadilan.....	277
E. Konsekuensi Terhadap Sosial dan Kultural	278
F. Konsekuensi Terhadap Legitimasi Kebijakan, Akuntabilitas, Responsifitas Kebutuhan Masyarakat, dan Keadilan Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah	279
G. Pendekatan Inklusif, Digital, dan Adaptif Sebagai Upaya Pengembangan Teori Partisipasi Masyarakat Yang Lebih Holistik Dan Responsif.....	291
BAB VI : PENUTUP	303
A. Kesimpulan	303
B. Saran	305
DAFTAR PUSTAKA.....	308
LAMPIRAN.....	324
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	327